

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebelum dimulainya era dominasi Politik Global Amerika Serikat, Inggris merupakan negara yang mendominasi dunia internasional. Akan tetapi pasca Perang Dunia I (1914-1919), Inggris kehilangan kekuatan politiknya dengan Prancis, Jerman, dan Rusia. Pada Perjanjian Versailles yang dilakukan setelah Perang Dunia I, para sekutu pemenang perang tersebut lebih memilih berkonsentrasi di bidang politik seperti batas wilayah nasional, koloni, keamanan dan ganti rugi akibat perang.<sup>1</sup> Inggris yang sebelumnya menguasai sistem internasional dengan penguasaannya atas sebagian besar rute perdagangan Eropa mengalami kemunduran dengan bangkitnya Jerman, Uni Soviet, dan Amerika Serikat (AS) pada saat itu. Hal ini terjadi pasca depresi hebat pada tahun 1930an yang ditandai dengan runtuhnya *Pax Britannica*<sup>2</sup> dan kemudian digantikan oleh *Pax Americana*.

*Pax Americana* adalah periode penguasaan berbagai sektor seperti perdagangan, militer, produksi, serta ilmu pengetahuan oleh Amerika yang muncul setelah runtuhnya kekuasaan Inggris pasca Perang Dunia II. *Pax Americana* berawal dari kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh Perang

---

<sup>1</sup> Richard J. Peet, *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO*, Zed Book, 2003, hlm 29.

<sup>2</sup> *Pax Britannica* adalah periode penguasaan Inggris (British) terhadap sektor industri, jalur perdagangan dunia, serta militer.

Dunia II yang kemudian memberikan peluang kepada Amerika untuk memberikan bantuannya terhadap negara-negara yang terlibat dan terkena dampak perang.<sup>3</sup>

Perang Dunia II, dapat dikatakan sebagai perang total dan konflik terparah sepanjang sejarah manusia.<sup>4</sup> Perang yang menewaskan kurang lebih 62 juta jiwa<sup>5</sup> tersebut pada akhirnya menyebabkan kerusakan parah dan kelaparan saat itu. Pada akhir masa Perang Dunia II tahun 1944, AS dan Inggris membentuk suatu kerjasama yang disebut dengan *Bretton Woods System*. Kerjasama ini dipimpin oleh AS dan Inggris dengan 44 negara anggota. Pada dasarnya, kerjasama ini merupakan langkah awal dibentuknya Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*), Bank Dunia (*World Bank*), dan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) bertujuan yang untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia pasca perang.<sup>6</sup>

Pada tahun 1945, AS sebagai salah satu negara dari blok sekutu pemenang pada Perang Dunia II kemudian mencetuskan berdirinya suatu organisasi internasional yang dapat menciptakan dan menjaga perdamaian dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 dan membawahi 51 negara pada saat itu dengan AS sebagai salah satu pemegang hak veto dalam Dewan Keamanan PBB.<sup>7</sup> Pasca usainya Perang Dunia II, pembagian dunia pasca perang kemudian diresmikan oleh dua aliansi militer internasional, *The North Atlantic Treaty*

---

<sup>3</sup> John Bellamy Foster dan Robert W. McChesney, "American Empire: Pax Americana or Pox Americana?", <http://monthlyreview.org/2004/09/01/the-american-empire-pax-americana-or-pox-americana/>, diakses pada 30 Januari 2016 pukul 18.46

<sup>4</sup> Donald Sommerville, *The Complete Illustrated History of World War Two: An Authoritative Account of the Deadliest Conflict in Human History with Analysis of Decisive Encounters and Landmark Engagements*, Lorenz Books, 2008, hlm 5.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*, Richard J. Peet, hlm 27.

<sup>7</sup> "History of the United Nations", <http://www.un.org/en/aboutun/history/>, diakses pada 28 April 2015 pukul 03:03.

*Organization* (NATO) dibawah pimpinan AS, dan Pakta Warsawa dibawah pimpinan Uni Soviet.

Sebagai salah satu perang terburuk, Perang Dunia II menyisakan berbagai kerusakan dan krisis bahan pangan yang terjadi di berbagai negara. Hal ini kemudian membuka jalan bagi AS untuk terlibat dalam membantu negara-negara yang mengalami kerusakan pasca perang. Melalui Doktrin Truman<sup>8</sup> yang diterapkan pada *Marshall Plan*, AS kemudian memberikan bantuan sekitar US\$17 miliar bagi enam belas negara dalam periode empat tahun. AS memberikan sejumlah makanan, bahan bakar, pupuk, alat-alat pertanian dan pertambangan, dan bahan-bahan mentah ke sejumlah negara di Eropa.<sup>9</sup>

Dalam Doktrin Truman yang diaktualisasikan dalam *Marshall Plan* tersebut, Presiden AS Harry S. Truman mencetuskan *Point Four Program*, yaitu:

1. AS akan mendukung PBB dan berperan dalam pengambilan keputusan.
2. AS akan melanjutkan program perbaikan ekonomi dunia.
3. AS akan melindungi kemerdekaan dan kedamaian penduduk seluruh dunia dari agresi.
4. AS akan mencanangkan program modernisasi dan investasi kapital.

Doktrin Truman, kemudian menjadi titik berangkat dari Politik Global AS yang bersifat menekan dan mendominasi dalam sistem internasional<sup>10</sup> hingga saat ini.<sup>11</sup> Keberhasilan *Marshall Plan* ini, kemudian diklaim melalui kebangkitan

---

<sup>8</sup> Doktrin Truman adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Harry S.Truman mengenai bantuan ekonomi dan militer terhadap Negara-negara Eropa dengan tujuan untuk mencegah mereka jatuh kedalam kekuasaan Uni Soviet.

<sup>9</sup> Charles P. Kindleberger, *The Marshall Plan and the Cold War, International Journal*, Vol. 23, No.3, 1968, hlm 369-382.

<sup>10</sup> Sistem internasional dalam Hubungan Internasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi dari dunia perpolitikan internasional.

<sup>11</sup> Saddam Hussein, Eksistensi AS Sebagai Kekuatan Global, *Jurnal Global & Policy* Vol.1, No.1, Januari - Juni 2013, hlm 87.

perekonomian negara-negara Eropa pada masa itu serta meningkatnya perekonomian AS selaku negara pendonor.<sup>12</sup>

Selain di negara-negara Eropa, AS sebelumnya juga telah memperluas pengaruhnya di daratan Amerika Latin. Hal ini dilakukan melalui Doktrin Monroe yang dikeluarkan pada 2 Desember 1823 yang berisi mengenai penolakan AS terhadap campur tangan negara non-Amerika terhadap negara-negara Amerika Latin. Beberapa poin utama yang terdapat dalam Doktrin Monroe yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Negara AS tidak akan turut campur tangan dalam urusan Negara Eropa
2. Eropa tidak boleh campur tangan dengan keberadaan Pemerintah Amerika.
3. Eropa tidak boleh menjajah lebih lama di Amerika.

Ketiga hal ini dapat diartikan sebagai *America for Americans*, dimana negara-negara Amerika Utara dan Amerika Latin merupakan daerah bebas dari penaklukan Bangsa.<sup>14</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi awal pengaruh AS di wilayah Amerika Latin. Dengan adanya Doktrin Monroe ini, AS semakin mendominasi di wilayah Amerika Latin.

Selain Doktrin Truman di atas, bentuk lain perpanjangan tangan AS di Amerika Latin yaitu istilah yang biasa disebut sebagai *Backyard Policy* (Kebijakan Halaman Belakang). Istilah ini merupakan salah satu contoh dari pola pikir kolonial, dimana halaman belakang biasanya merupakan hutan atau lahan kosong yang perlu dijinakkan, tempat untuk perpanjangan properti, serta tempat di

---

<sup>12</sup> Diane B. Kunz, "The Marshall Plan Reconsidered: a Complex of Motives", *Foreign Affairs*, Vol.76, No.3, 1997, hlm 162-170.

<sup>13</sup> Hidayat Mukmin, Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa Ini, Ghalia Indonesia, 1981, hlm 139-193.

<sup>14</sup> *Ibid.*

mana seseorang bebas keluar masuk tanpa ada aturan khusus yang mengaturnya.<sup>15</sup> *Backyard Policy* memberikan tinjauan terhadap Kebijakan Luar Negeri AS dengan cara menjelaskan sejarah hubungan AS-Amerika Latin dengan AS sebagai negara ‘Utara’ (produsen kebijakan) dan Amerika Latin sebagai ‘Selatan’ (penerima kebijakan). Hal ini kemudian didukung oleh berbagai sumber-sumber berupa pernyataan kongres dan dokumen rahasia yang berisi sejarah intervensi AS di Amerika Latin.<sup>16</sup> Secara umum, intervensi merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain. Campur tangan tersebut dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun bidang kemasyarakatan lainnya.<sup>17</sup>

Dengan dibentuknya pola pemikiran mengenai ‘Utara’ dan ‘Selatan’ melalui istilah *Backyard Policy* oleh AS tersebut, kemudian terbentuklah suatu dominasi oleh AS terhadap negara-negara Amerika Latin. Beberapa dominasi yang dilakukan AS di Amerika Latin yaitu dengan menyebarkan nilai serta paham demokrasi dan liberalisme di Amerika Latin.<sup>18</sup> Upaya tersebut semakin jelas terlihat melalui program-program pembangunan yang dilakukan oleh AS melalui IMF dan *World Bank* di Amerika Latin. Disamping upaya pembangunan tersebut, globalisasi dan pasar bebas juga dikembangkan melalui perusahaan-perusahaan multinasional AS yang ada di Amerika Latin.

---

<sup>15</sup> Grace Livingstone, *America's Backyard: The United States and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror*, Zed Books, London and New York, 2009, hlm 15.

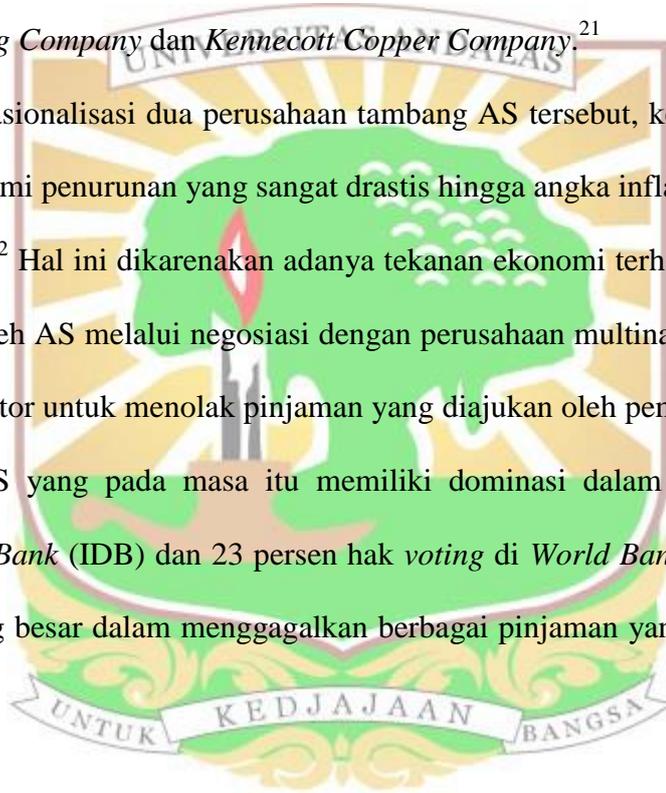
<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia (Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hlm 94.

<sup>18</sup> Andi Adnan Mukhsin, *Kebijakan Nasionalisasi Minyak dan Gas serta Legalisasi Koka di Bolivia dalam Menghadapi Hegemoni AS Periode 2005-2009*, Skripsi, 2013, hlm 36.

Salah satu contoh negara Amerika Latin yang mendapat intervensi dari AS yaitu Chile. Intervensi AS di Chile semakin menguat pasca diangkatnya Salvador Allende sebagai Presiden Chile pada tahun 1970.<sup>19</sup> AS melakukan upaya intervensi terhadap Chile pada masa Pemerintahan Allende dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Allende untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Chile. Dua diantaranya adalah perusahaan transnasional terbesar AS di bidang pertambangan<sup>20</sup> yang memiliki profit sangat besar di Chile, yaitu *Anaconda Copper Mining Company* dan *Kennecott Copper Company*.<sup>21</sup>

Pasca nasionalisasi dua perusahaan tambang AS tersebut, keadaan ekonomi Chile mengalami penurunan yang sangat drastis hingga angka inflasinya mencapai 293,8 persen.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan adanya tekanan ekonomi terhadap Chile yang diupayakan oleh AS melalui negosiasi dengan perusahaan multinasional milik AS dan para investor untuk menolak pinjaman yang diajukan oleh pemerintah Chile.<sup>23</sup> Selain itu, AS yang pada masa itu memiliki dominasi dalam *Inter-American Development Bank* (IDB) dan 23 persen hak *voting* di *World Bank* juga memiliki pengaruh yang besar dalam menggagalkan berbagai pinjaman yang diajukan oleh



---

<sup>19</sup> Awigra, Dukungan AS terhadap Rezim Pelanggar HAM dan Anti Demokrasi (Studi Kasus Dukungan AS di Chile pada Pemerintahan Augusto Pinochet 1973-1990), Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Jakarta, 2011, hlm 62.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Angela Vergara, *Copper Workers, International Business, and Domestic Politics in Cold War Chile*, The Pennsylvania State University Press University Park, Pennsylvania, 1972, hlm 13.

<sup>22</sup> Ricardo Ffrench and Davis, *Economic Reforms in Chile From Dictatorship to Democracy*, Palgrave Macmillan, Second edition, 2010, hlm 8.

<sup>23</sup> Senate Select Committee on Intelligence Activities, Staff Report, *Covert Action in Chile 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities United States Senate*, U.S. Government Printing Office, Washington, 1975, hlm 105.

Chile.<sup>24</sup> Hal ini dikarenakan proyek nasionalisasi yang dilakukan Allende dianggap mengganggu kepentingan nasional AS.

Dari berbagai literatur yang ada, kekayaan alam Chile yang meliputi tembaga, baja, perak, malibdenum, mangan, serta batu bara merupakan salah satu kepentingan nasional negaranya yang harus dilindungi oleh Pemerintah AS di Chile.<sup>25</sup> Oleh karena itu, kekayaan alam Chile yang melimpah dianggap sebagai salah satu daya tarik dalam upaya dominasi serta penguasaan AS di Chile.

Pada dasarnya, nilai-nilai AS didasarkan pada apa yang dibutuhkan secara filosofis, hukum, dan basis moral untuk melanjutkan sistem AS. Dengan adanya dua perang besar dalam dunia internasional, AS menyadari kepentingan nasionalnya sesuai dengan kepentingan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai AS terhadap negara lain menjadi prioritas bagi Pemerintah AS. Keadaan inilah yang kemudian membuat nilai-nilai yang terdapat dalam kepentingan nasional AS dapat ditemui di berbagai belahan dunia.<sup>26</sup>

Kepentingan nasional AS, pada dasarnya merupakan aktualisasi dari nilai-nilai AS yang kemudian diproyeksikan ke dalam Kebijakan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri AS. Salah satu tujuan dari kepentingan nasional AS yaitu untuk menciptakan dan menjaga agar situasi dalam dunia internasional dapat menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip yang dianut oleh AS.<sup>27</sup> Kebijakan Luar Negeri AS pada akhirnya menjadi ranah konflik antara para pembuat kebijakan dengan masing-masing kepentingannya. Contohnya yaitu keinginan AS untuk mencegah pengaruh sistem tertutup serta

---

<sup>24</sup> Rockefeller, *The Rockefeller Report on The Americas*, 1969, hlm 45.

<sup>25</sup> John J. Johnson, "Chile", <http://www.britannica.com/place/Chile>, diakses pada 18 Januari 2016 pukul 15.23.

<sup>26</sup> *Ibid*, Awigra hlm 19.

<sup>27</sup> *Ibid*, Awigra hlm 18.

ideologi komunisme dengan penggunaan kekerasan atau mendukung kudeta dan pemberontakan.

Akan tetapi, perbedaan sistem ideologi bukanlah satu-satunya kepentingan AS di Chile. Kekayaan sumberdaya alam Chile, merupakan bentuk lain dari kepentingan AS yang ada di sana. Oleh karena itu, nasionalisasi yang dilakukan oleh Allende menjadi salah satu benturan besar antara kepentingan AS dan Pemerintah Chile pada masa Allende. Sebab dengan adanya nasionalisasi tersebut, para pemilik *Multinational Corporation* (MNC) AS pun kemudian mengalami kerugian dikarenakan diambil alihnya perusahaan milik mereka oleh Pemerintah Chile. Sehingga para pengusaha ini pun tidak dapat meneruskan eksploitasinya terhadap sumberdaya alam Chile.

Terancamnya kepentingan AS di Chile menimbulkan konflik antara Pemerintah AS dan Chile sehingga *Pemerintah AS* yang saat itu berada di bawah pimpinan Richard Nixon melakukan intervensi terhadap Chile. AS melalui lembaga intelijen *Central Intelligence Agency* (CIA)<sup>28</sup> bekerja sama dengan Augusto Pinochet, Jenderal Militer Chile dalam melakukan kudeta militer<sup>29</sup> pada saat pemerintahan Allende. Kudeta militer pada dasarnya merupakan salah satu bentuk intervensi dan perlawanan dari anggota militer terhadap pemerintahan di suatu negara. Dalam kasus Chile, kudeta bertujuan untuk mendukung Pinochet sebagai pengganti Allende agar perusahaan-perusahaan AS yang telah dinasionalisasi dapat kembali diprivatisasi oleh para investor asing.

---

<sup>28</sup> CIA adalah lembaga intelijen Amerika yang bertugas mencari, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi, dan menyebarkan informasi intelijen yang didirikan oleh Presiden Truman melalui Undang-Undang Keamanan Nasional Amerika pada 1947. <https://www.cia.gov/about-cia/history-of-the-cia>, diakses pada 9 Februari 2015 pukul 08:39.

<sup>29</sup> William Akoto, *On the Theory and Practice of Organizing and Staging a Coup D'Etat: A Critical Examination of Three Seminal Works*, Working Paper No. 1081, Department of Political Science University of South Carolina, Agustus, 2014.

Selain kudeta militer, AS juga melakukan intervensi melalui cara pemboikotan ekonomi Chile dengan menutup kran perdagangan suku cadang terhadap Chile. Tidak hanya AS, Anaconda salah satu perusahaan tambang yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Chile juga ikut serta dalam upaya ini dengan memberi penawaran para pekerja tambang untuk bekerja di negara Amerika Latin lain dan dengan gaji yang lebih tinggi. Sejalan dengan Anaconda, Kennecoth pun juga melakukan kampanye terhadap pasar yang menyatakan bahwa dengan membeli tembaga Chile, berarti membeli barang hasil curian.<sup>30</sup> Fenomena seperti ini menjadi menarik dikarenakan dalam intervensi terhadap Chile ini pihak yang terlibat tidak hanya Pemerintah AS dan orang-orang anti-Allende di Chile, melainkan juga perusahaan multinasional AS. Kampanye yang dilakukan secara aktif seperti ini dinilai berpengaruh cukup besar terhadap penurunan tingkat kepercayaan masyarakat Chile terhadap Allende.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Chile ini kemudian dapat membantu intervensi yang dilakukan oleh AS terhadap Chile. Hal ini dikarenakan AS berpotensi untuk memiliki lebih banyak massa dalam melakukan kudeta militer terhadap Allende. Presiden AS Richard M. Nixon, CIA (*Central Intelligence Agency*), serta para pejabat tinggi AS ikut terlibat di dalam kudeta militer yang dilakukan oleh Pinochet saat itu. Setelah berlangsungnya kudeta militer di Chile, Direktur CIA William Colby mengkonfirmasi dan membenarkan dukungan ekonomi Pemerintah AS ke Chile. Dukungan ekonomi tersebut diberikan kepada partai politik anti-Allende, media, dan organisasi sektor privat di Chile dengan jumlah hampir mencapai US\$ 8.000.000 untuk menentang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 73-74.

Allende.<sup>31</sup> Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa CIA ikut berperan aktif dalam melakukan intervensi dengan mendukung sejumlah pihak di Chile untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Allende.<sup>32</sup> Di mana hal ini bertujuan untuk mengambil alih kepemimpinan Allende yang dinilai merugikan AS dengan menasionalisasi perusahaan multinasional milik AS.

Selain nasionalisasi, pemikiran politik Allende yang berhaluan sosialis<sup>33</sup> juga menjadi dasar kekhawatiran AS yang memicu upaya penggulingan kekuasaan Allende di Chile. Terlebih situasi politik dunia pada masa itu masih dalam tahap perang ideologi antara komunisme (Uni Soviet) dan liberalisme (AS). Sehingga ada kekhawatiran dari Pemerintah AS bahwa akan ada efek domino terhadap negara-negara Amerika Latin dengan terpilihnya Allende sebagai Presiden Chile masa itu. Oleh karena itu penelitian ini tidak hanya menganalisis intervensi yang dilakukan oleh AS terhadap Chile saja. Melainkan juga membahas mengenai motif atau kepentingan nasional yang melatar belakangi dilakukannya intervensi oleh AS terhadap Chile.

## 1.2 Rumusan Masalah

AS sebagai negara yang memiliki kekuasaan dan dominasi yang cukup kuat seringkali berperan aktif dalam mempengaruhi keadaan domestik di suatu negara. Terlebih di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang dapat mengancam kepentingan nasional AS yang ada di sana. Pengendalian kekuasaan dan

---

<sup>31</sup> Jeremi Suri, Henry Kissinger and the American Century, *The Belknap Press of Harvard University Press*, 2007, hlm 239.

<sup>32</sup> Grace Livingstone, *America's Backyard: The United States and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror*, Zed Books Ltd, 2009, hlm. 58.

<sup>33</sup> *Ibid*, Awigra, hlm 62.

keterlibatan dalam urusan domestik suatu negara yang diupayakan oleh AS dilakukan melalui berbagai cara dan strategi, salah satunya yaitu intervensi.

Dari berbagai literatur yang ada, dapat diasumsikan AS memiliki keterlibatan dalam melakukan intervensi pada masa pemerintahan Allende di Chile dalam rangka mempertahankan kepentingan nasionalnya yang ada di Chile. Oleh karena itu penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan intervensi yang dilakukan oleh AS dalam upaya mempertahankan kepentingan nasionalnya di Chile pada masa pemerintahan Allende.

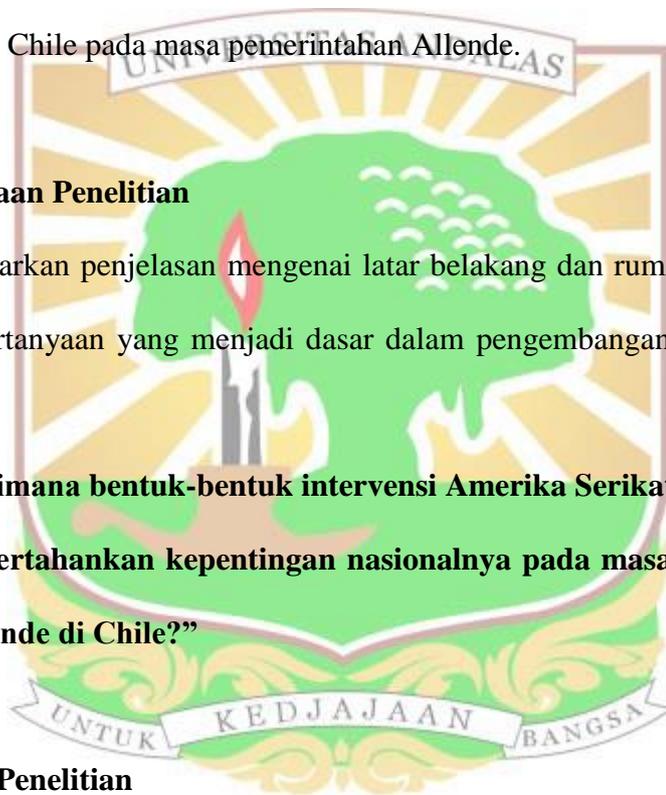
### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang menjadi dasar dalam pengembangan penelitian bagi peneliti yaitu :

**“Bagaimana bentuk-bentuk intervensi Amerika Serikat sebagai upaya dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya pada masa pemerintahan Salvador Allende di Chile?”**

### 1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya AS dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan melakukan intervensi terhadap Chile pada masa pemerintahan Salvador Allende.



## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua jenis manfaat. Yaitu manfaat secara akademis dan praksis. Manfaat secara akademis dan praksis yang dimaksud yaitu sebagai berikut.

### 1. Akademis

Agar dapat menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional maupun ilmu-ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai keterlibatan suatu negara dalam upaya intervensi terhadap negara lain.

### 2. Praksis

Agar penelitian ini dapat dibaca oleh masyarakat maupun anggota pemerintahan yang ingin memahami mengenai intervensi suatu negara terhadap negara lain dalam rangka mempertahankan kepentingan nasionalnya.

## 1.6 Studi Pustaka

Para ahli dan sarjana ilmu sosial telah banyak menelaah peran serta AS dalam sistem internasional dengan multidisiplin ilmu dan area permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti akan menampilkan beberapa tulisan yang juga menelaah permasalahan ini yang sekiranya dapat mendukung peneliti dalam mengembangkan penelitian ini.

Pertama, peneliti menggunakan tulisan dari Bradd Crouch Hayes yang berjudul *The Invisible Blockade and the Covert War: U.S. Relations with Chile*,

1970-1973.<sup>34</sup> Pada tulisan ini, Hayes menjelaskan mengenai hubungan antara AS dan Chile pada masa pemerintahan Allende. Selain itu, Hayes juga menjelaskan tindakan AS dalam upayanya untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat Chile terhadap Allende.

Tulisan Hayes ini digunakan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan untuk membantu peneliti dalam menganalisa dan melengkapi data-data mengenai upaya intervensi AS dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya di Chile. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori dan konsep yang berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh Hayes. Selain itu, data penelitian ini juga dilengkapi dengan data-data dari sumber-sumber lain yang dinilai cukup relevan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

Tulisan selanjutnya yang peneliti jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu tulisan dari Jiřina Rybáček Mlýnková dengan judul *Chile Under Allende: A Bibliographical Survey*.<sup>35</sup> Di dalam tulisan ini, Mlýnková menjelaskan mengenai kemenangan Allende sebagai Presiden Chile yang meraih kemenangan hanya melalui selisih angka satu persen dengan pesaingnya, Jorge Alessandri. Di dalam tulisan ini, Mlýnková lebih banyak menjelaskan mengenai kebijakan dan pola kepemimpinan Allende pada saat menjabat sebagai Presiden Chile dan kudeta militer yang dilakukan oleh Augusto Pinochet.

Hegemoni AS dalam sebuah institusi keuangan internasional (IMF) dijelaskan pada tulisan lain oleh Mansour Fakih yang berjudul *Neoliberalisme dan*

---

<sup>34</sup> Bradd Crouch Hayes, *The Invisible Blockade and the Covert War: U.S. Relations With Chile, 1970-1973*, Lieutenant, United States Navy B.S., University of Utah, 1971

<sup>35</sup> Jiřina Rybáček Mlýnková, *Chile Under Allende: A Bibliographical Survey*, Princeton University, New Jersey, 1976.

*Globalisasi*.<sup>36</sup> Di dalam tulisannya, Mansour menjelaskan bahwa sistem globalisasi dan proses produksi sengaja diciptakan sebagai upaya untuk menciptakan hirarki jaringan produksi dan perdagangan skala global yang dikembangkan melalui penciptaan dan pengalokasian *Export Processing Zones* (EPZ).<sup>37</sup> EPZ ini biasanya dikembangkan di negara-negara Dunia Ketiga yang memiliki standar upah yang rendah. Sehingga keuntungan yang dicapai dari hasil produksi suatu perusahaan asing akan lebih tinggi.

Selain itu, pada jurnal ini Mansour juga menjelaskan bahwa AS merupakan negara yang paling berpengaruh di dalam salah satu institusi keuangan internasional yang ada di dunia, yaitu IMF. Hal ini dikarenakan AS merupakan satu-satunya negara yang memiliki hak voting mencapai 17,8%.<sup>38</sup> Hal ini tentu sangat mencerminkan tingginya pengaruh AS di dalam institusi keuangan internasional ini. Terlebih hingga saat ini tidak ada negara lain yang memiliki hak voting lebih dari 6%, kecuali AS. Bahkan, mayoritas dari anggota IMF hanya memiliki hak voting kurang dari 1%. Hal inilah yang kemudian membuat AS menjadi lebih leluasa dalam memfasilitasi kepentingannya di Chile melalui IMF dengan cara menolak pinjaman yang diajukan Pemerintah Chile pada masa Pemerintahan Salvador Allende.<sup>39</sup>

Tulisan selanjutnya yang peneliti gunakan untuk membantu penelitian ini yaitu tulisan dari Samuel Mitchell dengan judul *The Third World War: American Hegemony in Latin America and the Overthrow of Salvador Allende*. Dalam

---

<sup>36</sup> Mansour Fakih, Neoliberalisme dan Globalisasi, Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manar, Edisi I, 2004.

<sup>37</sup> *Export Processing Zones* (EPZ) adalah suatu wilayah negara yang dikhususkan sebagai ekspor industri dengan syarat mau dan mampu mengembangkan aturan perburuhan dan pajak domestik agar menarik bagi perusahaan transnasional untuk beroperasi.

<sup>38</sup> *Ibid*, Mansour Fakih, hlm 9.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 12.

tulisannya ini, Mitchell menjelaskan mengenai hegemoni AS di Amerika Latin dan upaya penggulingan kekuasaan Salvador Allende di Chile. Upaya penggulingan kekuasaan Salvador Allende di Chile oleh AS melalui CIA dibahas secara detail pada tulisan ini. Pemikiran Allende sebagai seseorang yang beraliran marxis menjadi masalah utama bagi pihak AS dalam hal ini.<sup>40</sup> Kekhawatiran akan adanya upaya perlawanan terhadap pemikiran AS oleh Allende semakin terbukti saat dinasionalisasinya perusahaan multinasional milik AS. Hal inilah yang kemudian menjadikan AS semakin gencar melakukan upaya penggulingan kekuasaan Allende di Chile. Sesuai dengan tulisan di atas, peneliti nantinya akan meneliti mengenai apa dan bagaimana bentuk keterlibatan AS dalam transformasi politik yang ada di Chile melalui penggulingan kekuasaan Salvador Allende.

Tulisan selanjutnya yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini yaitu tesis dari Awigra yang berjudul *Dukungan AS terhadap Rezim Pelanggar HAM dan Anti Demokrasi (Studi Kasus Dukungan AS di Chile pada Pemerintahan Augusto Pinochet 1973-1990)*. Dalam tesis ini, Awigra menjelaskan mengenai peran AS dalam mempengaruhi situasi politik dan keamanan di Chile dan juga peran AS dalam mendukung berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Chile.<sup>41</sup> Akan tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan pada batasan masalah, peneliti di sini lebih membatasi penelitian ini mengenai keterlibatan AS dalam transformasi politik di Chile melalui penggulingan kekuasaan Salvador Allende di Chile.

Selain itu, Awigra dalam tulisan tersebut juga membahas mengenai kepentingan-kepentingan AS di Chile yang kemudian membawa efek negatif

---

<sup>40</sup> Samuel Mitchell, *The Third World War: American Hegemony in Latin America and the Overthrow of Salvador Allende*, Claremont Colleges, 2012, hlm 36.

<sup>41</sup> *Ibid*, Awigra, hlm 60.

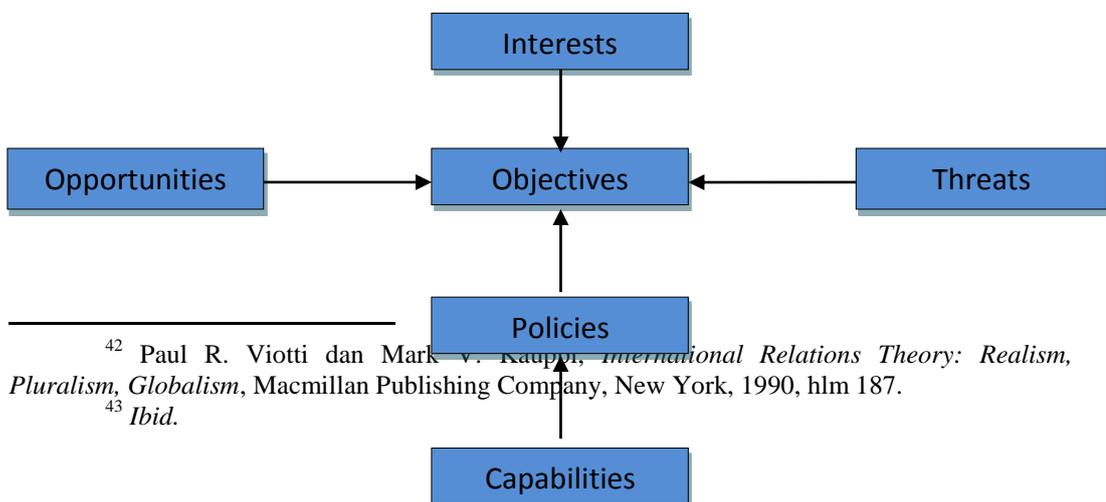
terhadap situasi perpolitikan di Chile. Benturan kepentingan yang terjadi antara AS dan Chile, selanjutnya menjadi faktor utama adanya campur tangan AS dalam mengatur pemerintahan di Chile. Hal ini kemudian memicu terjadinya krisis hebat di Chile yang pada akhirnya berujung pada digulingkannya Allende sebagai Presiden Chile melalui kudeta yang dipimpin oleh Augusto Pinochet.

Oleh karena itu, tulisan ini menurut peneliti bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian ini. Di mana tulisan Awigra ini juga membahas apa saja peran AS dalam pemerintahan di Chile. Terutama mengenai penggulingan Salvador Allende sebagai Presiden Chile oleh AS melalui kerjasamanya dengan Jenderal Angkatan Darat Chile, Augusto Pinochet.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Kepentingan Nasional

Dalam bukunya yang berjudul *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*<sup>42</sup> Mark V. Kauppi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki pola perilaku dalam agar dapat mencapai tujuan nasionalnya. Berikut adalah gambar dari pola perilaku negara menurut Kauppi dalam mencapai tujuannya.<sup>43</sup>



<sup>42</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, Macmillan Publishing Company, New York, 1990, hlm 187.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Pada gambar di atas dapat dilihat adanya hubungan antara kepentingan, kesempatan, ancaman dan kemampuan suatu negara dalam mencapai suatu tujuan melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Menurut Kauppi kepentingan, kesempatan, ancaman, dan kemampuan merupakan pertimbangan setiap negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mencapai tujuannya.



Lebih lanjut Mark V. Kauppi menjelaskan bahwa dalam kepentingan nasional setiap negara terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut.<sup>44</sup>

1. Kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup suatu negara merupakan kepentingan vital bagi setiap negara, dimana hal ini berorientasi pada pemeliharaan eksistensi suatu negara dalam dunia internasional.
2. Kemakmuran ekonomi. Hal ini menjadi tujuan pokok dari suatu negara bukan hanya demi kepentingan masyarakatnya, melainkan juga menjadi salah satu hal penting yang mempengaruhi hubungan suatu negara dengan negara lain di dalam dunia internasional.
3. Nilai-nilai inti. Pelestarian nilai-nilai inti dari setiap negara merupakan salah satu tujuan pokok dalam kepentingan nasional suatu negara. Di banyak negara Barat contohnya, mereka

---

<sup>44</sup> *Ibid, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, hlm 187-188.

menjadikan demokrasi sebagai elemen kunci dari identitas bangsanya.

Tiga tujuan utama ini yang kemudian menurut Kauppi akan mengendalikan hubungan dan kebijakan luar negeri suatu negara dengan negara lainnya dalam hubungan internasional. Menurut Kauppi ketiga tujuan utama ini dapat menjadi dasar dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, terutama apabila negara tersebut merasa kepentingan nasionalnya terancam. Salah satu contoh tindakan yang dilakukan oleh suatu negara ketika negara tersebut merasa kepentingan nasionalnya terancam yaitu dengan melakukan intervensi, baik itu secara nyata maupun melalui berbagai propaganda.

### **1.7.2 Intervensi**

Intervensi menurut K.J Holsti, yaitu tindakan radikal terhadap negara lain tanpa adanya izin dari pemerintah yang berkuasa melalui tindakan yang dapat berupa campur tangan diplomatik, memamerkan kekuatan, pemberontakan atau subversi perang gerilya serta penggunaan kekuatan militer. Intervensi menurut Holsti mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi urusan dalam negara lain yang berdaulat.<sup>45</sup>

Menurut Holsti, intervensi yang dilakukan oleh negara asing biasanya merupakan suatu tindakan yang diorganisasikan dengan sangat baik. Pasca dilakukannya intervensi oleh suatu negara terhadap negara lain, intervensi kemudian akan mempengaruhi situasi politik domestik dari negara tersebut. Termasuk di antaranya berupa kerjasama dan program diplomatik, ekonomi, serta

---

<sup>45</sup> K.J. Holsti, Politik Internasional Kerangka untuk Analisis, Erlangga, Jakarta, 1988, hlm 9.

militer. Menurut Rosenau dan Holsti intervensi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk lain tindakan negara karena intervensi, yaitu sebagai berikut.<sup>46</sup>

1. Intervensi merupakan keputusan tajam dari bentuk-bentuk intervensi konvensional dalam hubungan suatu negara.
2. Intervensi dengan sadar diarahkan untuk mengubah atau mempertahankan struktur penguasa politik di suatu negara tujuan. Hal ini bertujuan agar program kerjasama dan bantuan asing serta kepentingan nasional negara pengintervensi dapat masuk dengan lebih mudah.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa intervensi merupakan bagian dari politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain dengan cara melakukan campur tangan terhadap urusan domestik negara lain. Hal ini digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau meningkatkan nilai sosialnya di luar negeri melalui berbagai kegiatan di bidang ekonomi, politik, maupun militer. Menurut Walter S. Jones ada tiga hal yang menyebabkan berlangsungnya intervensi terhadap suatu negara, yaitu sebagai berikut.<sup>47</sup>

- 1) Banyak pemerintahan yang menyatakan bahwa mereka terpaksa melakukan intervensi militer ke negara lain karena adanya upaya destabilisasi pihak lain.
- 2) Intervensi sebagai awal dari sebuah revolusi melawan imperialisme dan kolonialisme.
- 3) Adanya perselisihan domestik yang mengancam kepentingan ekonomi negara-negara asing tertentu.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm 201.

Dalam konteks penelitian ini, poin ketiga merupakan penyebab langsung terjadinya intervensi AS di Chile pada masa pemerintahan Allende di Chile tahun 1973. Dimana perselisihan atau benturan kepentingan yang terjadi antara AS dan Chile ini dipicu oleh nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Chile terhadap perusahaan tambang milik AS di Chile.

Dalam intervensi terdapat berbagai bentuk yang biasanya dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Hal tersebut kemudian dibagi ke dalam lima kelompok yang berbeda, yaitu sebagai berikut.<sup>48</sup>

- 1) Berbagai tindakan politik rahasia. Tindakan politik rahasia yaitu kegiatan di mana peran pemerintah mengenai tindakan dari negaranya terhadap negara lain tidak diperlihatkan secara nyata. Tindakan politik rahasia ini dapat berupa penyuaapan dan penyebaran propaganda.
- 2) Demonstrasi kekuatan. Yaitu upaya untuk memperlihatkan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan untuk membantu maupun menghalangi pemberontakan dalam negeri suatu negara.
- 3) Subversi. Yaitu kegiatan pemberontakan yang diatur, didukung, atau diarahkan oleh kekuatan asing dengan menggunakan berbagai unsur masyarakat yang memiliki ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang berkuasa.
- 4) Perang gerilya. Yaitu jenis kegiatan yang menggabungkan antara teror dengan terang-terangan dan gerilya yang berpindah-pindah.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Politik Internasional Kerangka untuk Analisis, hlm 9.

- 5) Intervensi militer. Yaitu pengiriman sejumlah pasukan baik untuk mempertahankan maupun menggulingkan kekuasaan yang tengah berkuasa di suatu negara.

Sesuai dengan kerangka konseptual yang digunakan, penelitian ini nantinya akan menggabungkan konsep kepentingan nasional dan teori intervensi yang telah dijelaskan di atas untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Konsep kepentingan nasional digunakan sebagai pengantar terhadap sikap suatu negara dalam melakukan intervensi kepada negara lain yang akan dijelaskan dengan menggunakan teori intervensi.

## 1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>50</sup> Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai objek penelitian.

---

<sup>49</sup> DR. Deddy Mulyana, MA. *Methodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

<sup>50</sup> Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theories and Methods*. Second edition. 1992.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.<sup>51</sup> Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjelaskan mengenai intervensi AS terhadap Chile dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya di Chile.

### **1.8.1 Batasan Penelitian**

Penelitian ini mengambil rentang waktu dari tahun 1970 hingga 1973. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis upaya AS dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya di Chile melalui penggulingan kekuasaan Salvador Allende. Selain itu, hal ini juga dikarenakan Allende diangkat secara resmi menjadi Presiden Chile pada tahun 1970 dan kemudian digulingkan pada tahun 1973 melalui subversi yang dipimpin oleh Pinochet.

### **1.8.2 Metode Pengumpulan Data**

Sementara itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.<sup>52</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber data yang ada. Data tersebut yang didapat dari beberapa sumber yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Di mana data-data tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu website resmi Lembaga

---

<sup>51</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm 29.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm 62.

Pemerintahan AS. Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan. Data-data tersebut nantinya akan diolah kembali agar dapat menghasilkan jawaban yang tepat atas permasalahan dalam penelitian ini.

### 1.8.3 Unit Analisis

Menurut Mochtar Mas'ood, unit analisis adalah unit yang perilakunya akan diteliti atau yang juga dikenal dengan variable dependen.<sup>53</sup> Sedangkan variabel yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisis disebut dengan variabel independen atau unit eksplanasi<sup>54</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, maka unit analisis dari penelitian ini yaitu AS dan kepentingan nasional sebagai unit analisisnya.

### 1.8.4 Level Analisis

Level analisis adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti utamanya dalam politik internasional. Menurut Patrick Morgan, terdapat lima level analisis dalam melakukan penelitian, yaitu individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara dan sistem internasional.<sup>55</sup>

Sesuai dengan konteks penelitian ini, maka level analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sistem internasional. Karena dalam konteks ini

---

<sup>53</sup> Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES, hlm 110.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

peneliti akan menganalisis bagaimana upaya AS dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya di Chile melalui intervensi yang dilakukannya pada masa Allende. Keterlibatan AS sebagai suatu negara pada masa itu tidak hanya dilakukan atau dimainkan dalam level hubungan bilateral dan lingkup regional saja, melainkan hubungan yang terjalin dalam sistem internasional. Hal ini diperlihatkan melalui peran AS dalam mempengaruhi nilai bantuan lembaga internasional terhadap Chile pada masa Allende.

### 1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif menurut Bogdan & Biklen<sup>56</sup> adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pengolahan data adalah dengan mengumpulkan dan memilih data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian, data-data tersebut disusun secara sistematis dan dideskripsikan secara tekstual.

Melalui prosedur kualitatif, berbagai data dan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber berupa dokumen resmi pemerintah, jurnal, dan website resmi tersebut dikumpulkan. Kemudian data dan fakta tersebut dicocokkan, dan dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, hlm 58.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 Pendahuluan**

BAB ini merupakan BAB Pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB 2 Amerika Serikat dalam Dunia Internasional**

Pada bab ini peneliti akan membahas beberapa hal terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan nasional Amerika Serikat dalam politik global.
2. Politik global Amerika Serikat.

### **BAB 3 Dominasi Amerika Serikat di Chile**

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan tentang aktor dan dinamika dari fenomena yang sedang diteliti secara detail. Beberapa hal yang terkait dengan aktor dan dinamika dari fenomena tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Kepentingan nasional Amerika Serikat di Chile.
2. Dominasi Amerika Serikat di Chile.
3. Benturan kepentingan Amerika Serikat dan Chile.



## **BAB 4 Pembahasan**

Dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya pada masa pemerintahan Salvador Allende di Chile pada tahun 1973, AS melakukan berbagai bentuk intervensi terhadap Chile. Bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh AS terhadap Chile yaitu sebagai berikut.

1. Tindakan politik rahasia.
2. Subversi.

## **BAB 5 Kesimpulan dan Saran**

Bab ini nantinya akan menyuguhkan hasil terpenting dari penelitian ini, yaitu kesimpulan, saran, dan kontribusi yang didapat dari penelitian ini.

